



Panwaslu Gandeng Polisi

JOGJA - Lima terlapor kasus perusakan alat peraga kampanye dimana dua di antaranya oknum PNS, belum bisa diambil keterangannya oleh Panwaslu. Institusi pengawas pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) ini, belum bisa mendatangkan kelima terlapor yang semuanya bukan penduduk ber-KTP Kota Jogja itu. Untuk membantu proses hukum, maka Panwaslu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memanggil paksa mereka.

"Kami sedang konsultasikan dengan tim hukum dan kepolisian untuk memanggil mereka. Jika diperlukan, kami akan panggil paksa mereka," ujar Divisi Hukum Panwaslu Kota Jogja Sudarmanto, kemarin. Darmanto-panggilan akrabnya, menjelaskan, dengan alamat terlapor yang berada di luar Kota jogja, pihaknya sulit untuk melacak keberadaan mereka. Padahal, Panwaslu membutuhkan kecepatan untuk bisa mendapatkan keterangan dari pihak terlapor.

Tak hanya koordinasi dengan pelapor, Panwaslu saat ini juga tengah mencoba berkomunikasi dengan pihak yang terkait. Salah satunya, adalah pihak tim dari paslon nomor satu (1) Zuhrif Hudaya-Aulia Reza Bastian. "Kami juga hubungi semuanya," sambungnya.

Seperti telah diberitakan, Minggu (18/9) lalu, telah terjadi penangkapan oleh masyarakat terhadap lima orang pelaku perusakan alat peraga kampanye. Tapi, karena mereka tak memiliki kewenangan untuk menahan, masyarakat dari Pasukan Keamanan (Paskam) DPC PPP Kota Jogja itu, hanya meminta peralatan perusakan untuk barang bukti.

Dari alat bukti yang ditemukan, ada ratusan poster bertuliskan "Rajaku Milih Nomer Siji". Tapi, dari pihak tim sukses Zuhrif-Aulia saat dikonfirmasi soal penemuan atribut itu, tak ada yang merespon.

Dari Ketua Tim Pemenangkan Ardianto dan Zuhrif tak merespon sms dan telepon *Radar Jogja* saat itu. Meski menemukan atribut ini, Heri Joko Setyo menolak memanggil dari pihak tim nomor 1. Sebab, kesalahan atau pelanggaran menjadi tanggung jawab individu.

Rencananya, Panwaslu akan berkoordinasi dengan pihak terlapor yaitu Rolly, anggota Paskam PPP dan Anton Prabu Semendawai (Ketua DPC Gerindra). Kedua orang ini, rencananya akan diajak berkoordinasi dengan untuk bisa menghadirkan kelima terlapor untuk memberikan klarifikasi. (eri)

h. :
karta
Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 09 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005